

ABSTRAK

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peran dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Dari pembuktian tersebut ditentukan nasib terdakwa bersalah atau tidak. Pada tahap pembuktian ini, sesuai Pasal 52 KUHAP terdakwa berhak mengajukan bukti-bukti yang meringankan sebagai pembelaan untuk menimbulkan keyakinan hakim bahwa dirinya tidak bersalah. Pengajuan alat bukti yang meringankan oleh terdakwa tersebut untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjunjung tinggi asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Alat bukti yang diajukan terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah adalah alat bukti surat.

Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penggunaan alat bukti surat yang diajukan terdakwa dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Blora. (2) Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan penggunaan alat bukti surat yang diajukan terdakwa dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Blora.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan analisis secara deskriptif. Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan, dokumen dan penelitian lapangan. Penelitian hukum ini juga didukung dengan hasil wawancara terhadap narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penggunaan alat bukti surat oleh terdakwa bisa diterima oleh majelis hakim, walaupun kekuatan pembuktian dari alat bukti surat yang diajukan oleh terdakwa tidak bisa dipertimbangkan dalam putusan. Alasan dari majelis hakim karena alat bukti surat yang diajukan terdakwa bukan merupakan alat bukti yang bisa berdiri sendiri dan harus didukung dengan alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP Pasal 183 yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang mengatur jumlah minimum dari alat bukti yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. (2) Kelemahan alat bukti surat yang diajukan terdakwa antara lain: (a) Ditinjau dari segi formal, bahwa kekuatan pembuktian terhadap alat bukti surat dalam perkara pidana dikuasai oleh aturan yaitu Pasal 187 KUHAP, mereka harus menentukan keyakinan hakim, maka suatu akta otentik sekalipun dapat saja dikesampingkan oleh hakim. Pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, maka hakim bersifat bebas dan tidak terikat oleh alat bukti. (b) Ditinjau dari segi materiil, bahwa karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan sebuah surat. Meskipun tidak ada pengaturan khusus, sesuai dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut oleh KUHAP yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi, namun nilai kesempurnaannya pada alat bukti surat tidak mendukung untuk berdiri sendiri dan harus tunduk pada asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Kata Kunci : *Alat Bukti Surat, Pembuktian, Pidana Pembunuhan.*

ABSTRACT

Proof is an issue that plays a role in the court trial examination process purposes to find material truth. From the proof, it is determined the luck of the defendant, whether he/she is guilty or not. In this session, according to the Article 52 Criminal Code Procedures, defendant has a right to submit evidence that relieves as a defense to raise the confidence of the judge that he/she is not guilty. The submission of the evidence that relieves by the defendant is to protect the defendant's rights and uphold the principle of *equality before the law*. The evidence submitted by the defendant to prove that he/she is not guilty is documentary evidence.

The purposes of this research: (1) To know and analyze the implementation of the use of documentary evidence submitted by the defendant in a murder criminal case in Blora District Court. (2) To know the weaknesses and the solution in the implementation of the use of documentary evidence submitted by the defendant in a murder criminal case in Blora District Court.

This law research uses juridical empirical research method, by analyzing descriptively. In this research, it uses statutory approach, document and field research. This law research is also supported by the result of interview with informants.

The result of the research shows that: (1) The implementation of the use of documentary evidence submitted by the defendant can be accepted by panel of judges, although the strength of proof from the documentary evidence submitted by the defendant cannot be considered in the decision. The reason of the panel of judges is because the documentary evidence submitted by the defendant is not an evidence that can be stand-alone and should be supported by other evidences. This is suitable with the theory of proof adopted in The Criminal Code Procedures Article 183 that is the system of proof according to the negative constitution (*negatief wettelijk bewijstheorie*), that sets the minimum amount of the evidence, it is at least two valid evidences. (2) The weakness of the documentary evidence submitted by the defendant among others: (a) In terms of formal aspect, the strength of proof toward documentary evidence in a criminal case controlled by the rules, it is Article 187 Criminal Code Procedures, they have to determine the confidence of the judge, that even an authentic deed can be ruled out by the judge. The proof in a criminal case is to find the material truth, that the judge is free and does not bound by the evidence. (b) In terms of material aspect, the thing looked for in the criminal case is a material or real truth, so that the consequences is that the judge is free to use or rule out a document. Although there is no specific regulation, suitable with the negative proof system (*negatief wettelijk bewijstheorie*) that is embraced by Criminal Code Procedures, it is: there should be a confidence from the judge toward evidence submitted in the trial. Even though reviewed from the formal aspect of the legal documentary evidence, the perfect value of the documentary evidence does not support to be stand-alone and should subject to the proof minimum limit principle that is determined in the Article 183 Criminal Code Procedures.

Keywords : *Documentary Evidence, Proof, Murder Criminal.*